JIKE: Jurnal Ilmu Komunikasi Efek p-ISSN 2614-0829
Volume 9 No 1, Juli-Desember 2025 (137-150) e- ISSN 2615-7950

NARASI MEDIA ONLINE TERKAIT AKSI DEMOKRASI 2025 SEBAGAI REPRESENTASI KOMUNIKASI POLITIK

Yuli Amelia[1], Ida Ri'aeni[2]

[1]Program Studi S-1Ilmu Komunikasi, Fakultas Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP), Universitas Terbuka
[2]Program Studi S-1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Cirebon

Corresponding author : yuli91amia@gmail.com[1], ida.iswahyudi@gmail.com[2]

Submitted: 05/12/2025 | **Review:25/12/2025** | **Accepted: 28/12/2025** | **Published: 10/01/2026**
Website: https://e-journal.umc.ac.id/index.php/jike/index
DOI: https://doi.org/ 10.32534/jike.v9i1.8381

ABSTRAK

Aksi Demokrasi 2025 merupakan salah satu fenomena politik terbesar di Indonesia yang memunculkan tuntutan pembubaran DPR dan mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Di tengah derasnya arus informasi digital, media online berperan penting dalam membingkai isu ini dan membentuk persepsi masyarakat mengenai legitimasi politik dan demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media online mengonstruksi narasi pemberitaan tentang Aksi Demokrasi 2025 serta bagaimana representasi komunikasi politik yang tercermin dalam narasi tersebut memengaruhi persepsi publik terhadap legitimasi politik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis*) model Teun A. van Dijk. Data diperoleh dari artikel berita media daring nasional seperti Kompas.com, Detik.com, Tempo.co, dan CNN Indonesia pada periode Januari- Agustus 2025. Hasil penelitian mengindikasikan adanya perbedaan cara pemberitaan antar media. Narasi yang disampaikan oleh Tempo.co dan CNN Indonesia lebih menekankan pada partisipasi publik serta krisis legitimasi, sedangkan Kompas.com dan Detik.com lebih mengarahkan perhatian pada isu keamanan dan stabilitas nasional. Perbedaan penekanan tersebut mencerminkan adanya orientasi ideologis yang memengaruhi cara berita disusun dan turut berdampak pada pemahaman masyarakat tentang demokrasi serta tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga politik. Dalam konteks ini, media daring berfungsi tidak sekadar sebagai saluran penyampaian informasi tetapi juga sebagai agen yang membentuk realitas politik serta persepsi masyarakat mengenai legitimasi demokrasi di Indonesia.

Kata kunci: Aksi Demokrasi 2025, framing, komunikasi politik, legitimasi demokrasi, media online.

ABSTRACT

The 2025 Democracy Action (Action Demokrasi 2025) is one of the biggest political phenomena in Indonesia, giving rise to demands for the dissolution of the House of Representatives (DPR) and reflecting a crisis of public trust in legislative institutions. Amidst the rapid flow of digital information, online media plays a crucial role in framing this issue and shaping public perceptions of political legitimacy and democracy. This study aims to analyze how online media construct news narratives about the 2025 Democracy Action and how the representation of political communication reflected in these narratives influences public perceptions of political legitimacy in Indonesia. This study uses a descriptive qualitative method with a critical discourse analysis approach (Critical Discourse Analysis) model by Teun A. van Dijk. Data were obtained from news articles from national online media such as Kompas.com, Detik.com, Tempo.co, and CNN Indonesia during the period January- August 2025. The

results indicate differences in reporting methods between media. The narratives conveyed by Tempo.co and CNN Indonesia emphasize public participation and the crisis of legitimacy, while Kompas.com and Detik.com direct more attention to issues of national security and stability. These differences in emphasis reflect ideological orientations that influence how news is structured and impact public understanding of democracy and levels of public trust in political institutions. In this context, online media functions not merely as a channel for conveying information but also as an agent shaping political reality and public perceptions of the legitimacy of democracy in Indonesia.

Keywords: *Democracy Action 2025, framing, political communication, democratic legitimacy, online media.*

PENDAHULUAN

Perkembangan media daring yang berlangsung sangat cepat pada era digital kini dapat dipahami sebagai faktor yang memberikan pengaruh besar terhadap cara komunikasi politik di Indonesia dibentuk dan dijalankan karena teknologi informasi yang terus maju mendorong media daring berfungsi sebagai penopang utama dalam penyebaran berbagai informasi serta pendapat publik dan posisi media konvensional perlahan tergeser oleh kehadirannya (Dhinanti 2024). Fenomena Aksi Demokrasi 2025 yang berisi tuntutan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat memperlihatkan bahwa media digital memegang peranan yang sangat penting dalam memengaruhi cara masyarakat menilai beragam isu politik nasional dan hal ini tampak dari pemantauan terhadap sejumlah portal berita besar seperti Kompas.com Detik.com dan CNN Indonesia yang menunjukkan bahwa pemberitaan mengenai aksi tersebut menjadi salah satu isu politik yang paling sering diakses serta dibagikan oleh masyarakat sepanjang kuartal pertama tahun 2025. Di media sosial, tagar seperti #BubarDPR dan #AksiDemokrasi2025 mencapai jutaan interaksi di platform *Twitter/X*, *Instagram*, dan *TikTok*, menandakan tingginya atensi publik terhadap isu tersebut. Reaksi masyarakat pun beragam mulai dari dukungan terhadap tuntutan aksi hingga kritik keras terhadap metode demonstrasi yang secara tidak langsung menunjukkan adanya polarisasi dan meningkatnya sentimen negatif terhadap lembaga legislative (Al Farisi, 2025).

Dalam dinamika komunikasi politik kontemporer, peran media tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi secara netral tetapi justru memiliki kapasitas yang cukup besar untuk membentuk persepsi publik serta realitas sosial melalui cara pemilihan kata, penyusunan narasi, dan bingkai pemberitaan yang dihadirkan kepada masyarakat (Rustandi, 2020). Media daring sering kali menghadirkan muatan ideologi tertentu, kepentingan politik, serta agenda yang secara tidak langsung memengaruhi cara publik menafsirkan dan memahami berbagai isu politik yang berkembang di masyarakat. Contoh nyata terlihat pada peristiwa Aksi Demokrasi

2025 di mana isu pembubaran DPR dikemas oleh media dengan sudut pandang yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan redaksional dan afiliasi politik masing-masing. Beberapa media menampilkan aksi tersebut sebagai bentuk ekspresi demokrasi yang dilakukan oleh rakyat sedangkan media lain menafsirkannya sebagai potensi ancaman terhadap stabilitas politik nasional. Bentuk penyusunan narasi semacam ini memiliki dampak yang signifikan terhadap legitimasi politik lembaga DPR dan juga terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi secara keseluruhan (Bakry, 2024). (Ramadlan, 2022) menyatakan bahwa framing yang disajikan oleh media apabila bersifat ekstrem atau cenderung bias akan meningkatkan risiko delegitimasi terhadap lembaga politik dan pada saat yang sama membuat fondasi demokrasi di Indonesia menjadi lebih rentan terhadap kelemahan.

Penelitian ini dibangun di atas fondasi konsep-konsep utama yang menjadi pijakan dalam studi komunikasi politik serta konstruksi sosial terhadap realitas yang ada di masyarakat. Berdasarkan pemaparan Entman (1993) yang dikutip oleh (Muharrom, 2025), teori Framing menjelaskan bahwa media tidak sekadar berfungsi sebagai penyampai fakta secara apa adanya tetapi juga aktif menyoroti dan menekankan aspek-aspek tertentu dari realitas dengan tujuan membentuk cara pandang dan persepsi khalayak terhadap peristiwa yang terjadi sehingga pemahaman publik terhadap isu-isu tertentu dapat dipengaruhi dan diarahkan sesuai dengan konstruksi narasi yang dibentuk oleh media itu sendiri. Sementara itu Berger dan Luckmann (1966) dalam (Pamungkas, 2024), melalui teori The Social Construction of Reality menegaskan bahwa realitas sosial dibangun melalui proses interaksi dan interpretasi yang terus berlangsung, di mana media berperan sebagai agen pembentuk makna. Kedua teori ini menjadi dasar konseptual penelitian untuk memahami bagaimana media online mengonstruksi makna politik dan membentuk wacana publik dalam isu demokrasi digital.

Penelitian sebelumnya oleh (Wangsemukti, 2021) meneliti konstruksi media online terhadap kebijakan PSBB COVID-19 di DKI Jakarta dengan analisis *framing* Robert N. Entman. PSBB dipandang sebagai akibat ketidaktaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan oleh detik.com sementara narasi.tv menafsirkan PSBB sebagai bentuk pelarian tanggung jawab pemerintah. Orientasi ideologis serta pandangan yang berbeda terhadap kebijakan publik cenderung dimiliki oleh media dan hal ini dipengaruhi oleh posisi serta kepentingan editorial masing-masing. Pendekatan framing memang digunakan secara serupa tetapi konteks dan fokus analisis penelitian ini berbeda. Jika penelitian (Wangsemukti, 2021) menitikberatkan pada kebijakan kesehatan publik serta membandingkan dua media, penelitian ini lebih menekankan pada isu politik dan demokrasi terutama terkait dengan Aksi Demokrasi 2025 yang

menyerukan pembubaran DPR dan narasi yang dibangun oleh media daring dianalisis untuk melihat bagaimana persepsi publik terhadap legitimasi politik serta sistem demokrasi di Indonesia dibentuk.

Seiring dengan pergeseran lanskap komunikasi politik menuju ranah digital, kekosongan penelitian ini menjadi semakin penting untuk dikaji karena media daring tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi tetapi juga dimanfaatkan sebagai arena interaktif yang memediasi wacana publik. Posisi sentral media daring sebagai aktor utama dalam pembentukan opini politik semakin diperkuat oleh tingginya partisipasi digital, fenomena viralitas, serta konten yang dihasilkan oleh pengguna. Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis bagaimana narasi pemberitaan mengenai Aksi Demokrasi 2025 dibangun oleh media daring terutama terkait isu pembubaran DPR serta bagaimana representasi komunikasi politik yang terkandung dalam narasi tersebut membentuk persepsi publik terhadap legitimasi politik dan sistem demokrasi di Indonesia. Temuan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi jurnalis, pembuat kebijakan, dan masyarakat dalam praktik memahami serta mengelola pemberitaan politik dengan pendekatan yang lebih kritis dan bertanggung jawab sementara dari sisi teori, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dengan memperluas cakupan studi komunikasi politik sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai konstruksi realitas yang terjadi di era digital sehingga perspektif akademik dan praktis dapat saling melengkapi.

METODE

Penelitian ini diterapkan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang memanfaatkan metode analisis wacana kritis atau yang dikenal dengan istilah Critical Discourse Analysis (CDA) yang memungkinkan peneliti untuk menelusuri cara media membentuk makna dan pesan dalam konteks sosial. Menurut Denzin dan Lincoln (2011) yang dikutip dalam (Hasan, 2025), pendekatan kualitatif menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial melalui eksplorasi makna, pengalaman, serta konstruksi realitas yang muncul secara alami di lingkungan sosial. Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling sesuai untuk memahami bagaimana media daring membangun narasi dan representasi komunikasi politik melalui pemilihan bahasa serta struktur wacana yang digunakan dalam setiap pemberitaan. Data yang dianalisis dalam penelitian ini berupa data sekunder yang dikumpulkan dari empat portal berita daring nasional yaitu Kompas.com, Detik.com, Tempo.co, dan CNN Indonesia yang memberitakan tentang Aksi Demokrasi 2025 serta tuntutan pembubaran DPR. Seluruh

pemberitaan daring yang terkait isu tersebut yang diterbitkan dalam rentang waktu Januari hingga Agustus 2025 menjadi bagian dari populasi penelitian, dan proses pengambilan data dilakukan pada bulan Oktober 2025 sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran menyeluruh tentang bagaimana media menyajikan isu tersebut.

Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive dengan menetapkan kriteria tertentu yang menekankan pada berita utama atau headline yang secara eksplisit menyoroti isu yang menjadi fokus penelitian serta berita yang memiliki jangkauan luas atau bahkan viral di media sosial selain itu sampel juga dibatasi pada berita yang diterbitkan oleh media nasional yang memiliki reputasi dan kredibilitas tinggi sehingga data yang dikumpulkan dapat dijadikan acuan yang dapat dipercaya. Proses analisis data diterapkan dengan memakai kerangka analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Teun A van Dijk dan pendekatan tersebut menempatkan tiga aspek utama sebagai landasan dalam pengkajian yaitu struktur teks yang mencakup makrostruktur superstruktur dan mikrostruktur serta kognisi sosial yang menggambarkan cara pandang maupun ideologi yang dimiliki para jurnalis beserta lembaga medianya dan konteks sosial yang menghubungkan isi pemberitaan dengan kondisi sosial politik yang menjadi latar kemunculan teks tersebut (Mukhlis 2020). Ketika kerangka ini digunakan berbagai langkah pengkajian dijalankan seperti peneliti mengidentifikasi tema besar yang muncul dan menelaah pola pembingkaian yang dipakai dalam pemberitaan serta menafsirkan makna simbolik yang tersembunyi di dalam teks dan melakukan triangulasi sumber agar hasil penelitian dapat dinilai valid serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Narasi Media Online terkait Aksi Demokrasi 2025 dalam Isu Pembubaran DPR

Peran media daring menjadi sangat menentukan dalam membentuk cara masyarakat memahami isu politik karena proses penyusunan narasi serta penetapan fokus berita dan pemilihan gaya bahasa yang diterapkan dapat membuat arah persepsi publik bergerak ke tujuan tertentu. Dalam konteks Aksi Demokrasi 2025 yang menampilkan tuntutan pembubaran DPR media online berfungsi sebagai ruang utama tempat masyarakat saling bertukar makna dan memperdebatkan pandangan mengenai legitimasi lembaga legislatif tersebut. Hasil penelaahan terhadap berita yang dipublikasikan oleh portal nasional seperti Kompas.com Detik.com Tempo.co dan CNN Indonesia sepanjang Januari sampai Agustus 2025 menunjukkan bahwa

p-ISSN 2614-0829
e- ISSN 2615-7950

ada dua pola utama dalam cara narasi disampaikan kepada pembaca. Pertama, sejumlah media menggambarkan aksi tersebut sebagai bentuk ekspresi warga yang dianggap sah dalam menjalankan nilai-nilai demokrasi dan di sisi lain terdapat media yang lebih menonjolkan kemungkinan aksi itu memicu gangguan terhadap stabilitas politik serta ketertiban nasional. Perbedaan penyajian ini memperlihatkan bahwa ideologi kepentingan politik dan posisi media dalam relasinya dengan kekuasaan berperan langsung dalam menentukan arah serta penekanan narasi yang mereka bangun. Melalui penerapan Analisis Wacana Kritis Teun A van Dijk penelitian ini menunjukkan bahwa pada tataran makrostruktur atau gagasan utama teks media seperti Tempo.co dan CNN Indonesia cenderung memberi perhatian lebih pada narasi mengenai keterlibatan publik dan persoalan legitimasi DPR sehingga pemahaman masyarakat terhadap isu tersebut banyak dipengaruhi oleh bingkai pemberitaan yang dibentuk kedua media itu.

Sebagai ilustrasi berita Tempo.co berjudul "Kronologi Demo Memprotes DPR hingga Meluas Berubah Penjarahan" yang terbit pada 26 Agustus 2025 menggambarkan bahwa aksi protes muncul sebagai respons masyarakat terhadap kinerja lembaga legislatif yang dianggap tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan dengan baik dan narasi tersebut membentuk kesan bahwa seruan pembubaran DPR dapat dimaknai sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi politik serta sistem perwakilan yang dianggap kehilangan kepercayaan publik. Gambar 1 menampilkan rangkaian peristiwa demonstrasi tersebut dan visualisasinya ditampilkan secara menyeluruh pada halaman utama pemberitaan Tempo.co.

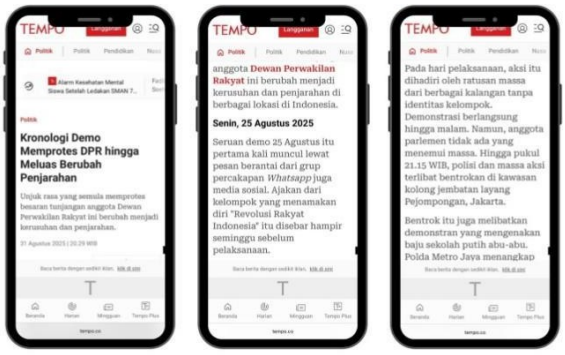

Gambar 1. Cuplikan berita Tempo.co berjudul "Kronologi Demo Memprotes DPR hingga Meluas Berubah Penjarahan", 26 Agustus 2025. (Sumber: Tempo.co, diakses 25 Oktober 2025).

Gambar tersebut menunjukkan bagaimana media membentuk bingkai pemberitaan dengan menampilkan aksi protes sebagai wujud kekecewaan publik terhadap lembaga legislatif dan hal ini ditonjolkan melalui pemilihan kata tertentu serta penekanan pada

p-ISSN 2614-0829
e- ISSN 2615-7950

dinamika konflik sosial yang berlangsung di lapangan. Di sisi lain media seperti Kompas.com serta Detik.com lebih mengarahkan perhatian pembaca pada aspek keamanan dan ketertiban publik melalui fokus pemberitaan yang menggambarkan langkah aparat dalam mengendalikan kerumunan serta kemungkinan munculnya tindakan yang melanggar hukum. Sebagai salah satu contoh berita Kompas.com berjudul "Demo 25 Agustus 2025 Tuntutan Bubarkan DPR Memanas di Jakarta" menampilkan situasi kericuhan sekaligus menggambarkan upaya polisi dalam membubarkan massa di depan Gedung DPR. Untuk memperlihatkan lebih jelas pola pembentukan narasi yang disusun oleh media tersebut peneliti menambahkan tangkapan layar dari berita terkait yang ditampilkan pada Gambar 2.

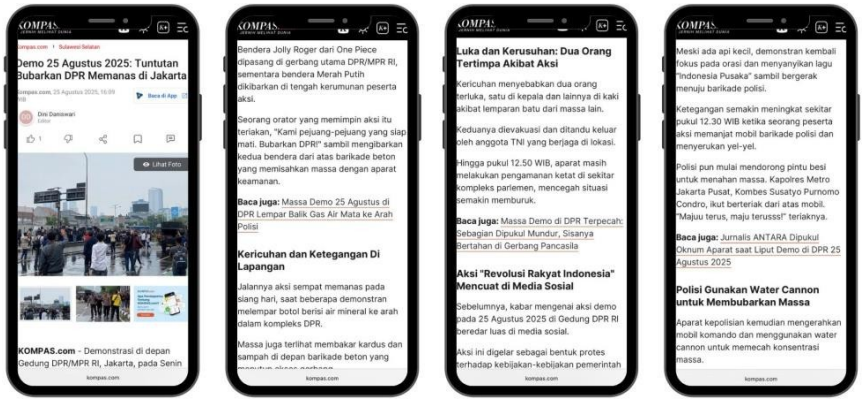

Gambar 2. Cuplikan berita Kompas.com berjudul "Demo 25 Agustus 2025: Tuntutan Bubarkan DPR Memanas di Jakarta", 25 Agustus 2025. (Sumber: Kompas.com, diakses 25 Oktober 2025).

Penekanan terhadap isu keamanan nasional serta penggambaran aksi massa sebagai sesuatu yang berpotensi mengganggu stabilitas negara tampak melalui cara Kompas.com merancang alur narasi dan menampilkan visual beritanya dan hal tersebut dapat diamati pada Gambar ini. Pada bagian superstruktur atau pola penyusunan informasi bagian awal berita biasanya diisi dengan materi yang bersifat emosional serta sensasional seperti gambaran konflik dan bentrokan serta penangkapan peserta aksi dan pola tersebut digunakan oleh banyak media. Strategi penyajian seperti itu membentuk persepsi pembaca sejak paragraf pertama sehingga peristiwa demonstrasi lebih mudah dianggap memiliki unsur bahaya dan menimbulkan suasana tegang (Yusuf, 2024).

Di sisi lain pada tingkat mikrostruktur yang meliputi pilihan bahasa dan diksi terlihat adanya perbedaan yang cukup jelas antara media yang lebih mendukung stabilitas pemerintah serta media yang menunjukkan sikap lebih kritis terhadap kekuasaan. Sebagai contoh,

Detik.com dalam pemberitaannya yang berjudul "Polisi Beberkan Alasan Pembubaran Massa Demo 25 Agustus 2025 di DPR" (Devi Puspitasari, 2025) menggunakan istilah-istilah seperti "massa anarkis", "provokasi", dan "pengamanan situasi" yang memperkuat citra negatif terhadap demonstran. Pilihan diksi yang menonjolkan aspirasi serta tuntutan politik masyarakat seperti frasa "gelombang aspirasi rakyat" dan "seruan pembaruan politik" serta "tuntutan reformasi demokrasi" dipakai oleh Tempo.co dan CNN Indonesia untuk menampilkan kesan bahwa mereka memberikan ruang solidaritas terhadap ekspresi politik publik dan strategi ini menunjukkan bagaimana arah pemberitaan dibentuk melalui bahasa. Praktik ideologis media yang tercermin dari perbedaan penggunaan kata tersebut membuat pembaca secara perlahan diarahkan untuk menafsirkan peristiwa politik yang berlangsung sesuai dengan bingkai yang disusun oleh media.

Dari sudut pandang kognisi sosial terlihat bahwa pola narasi yang disusun oleh media sangat dipengaruhi oleh hubungan politik pemilik modal serta posisi ideologis redaksi yang mengendalikan arah pemberitaan dan kondisi ini sejalan dengan uraian Shoemaker dan Reese (1996) dalam (Nova, 2025) yang menjelaskan bahwa isi media dibentuk oleh faktor institusional dan profesional serta kepentingan ekonomi dan politik yang mendasari kebijakan redaksional. Media yang memiliki orientasi independen seperti Tempo.co cenderung memberi ruang bagi kritik terhadap pemerintah dan memberi tempat pada suara masyarakat sipil sedangkan media yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan lebih sering membingkai aksi tersebut sebagai ancaman terhadap keamanan negara. Dalam situasi ini media daring tidak sekadar menjalankan fungsi sebagai penyalur informasi tetapi berperan pula sebagai aktor ideologis yang ikut menentukan arah perdebatan politik dalam ruang publik digital (Iswadi, 2025).

Selain itu hasil penelaahan terhadap isi pemberitaan menunjukkan bahwa media daring sering mengangkat sisi dramatik dari aksi protes dan mereka melakukannya dengan menonjolkan peristiwa seperti bentrokan antara massa dan aparat serta penggunaan gas air mata dan tindakan represif kepolisian sehingga pembaca diarahkan untuk melihat aksi tersebut sebagai momen politik yang besar serta sebagai ujian bagi keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan stabilitas negara. Sebagai ilustrasi CNN Indonesia menampilkan pemberitaan yang berfokus pada konfrontasi antara demonstran dan aparat di sekitar Gedung DPR dan penyajian itu diperkuat melalui foto-foto lapangan yang mendukung narasi konflik dan hal ini tampak pada Gambar 3 yang memperlihatkan bagaimana aspek dramatik dibangun

p-ISSN 2614-0829
e- ISSN 2615-7950

melalui visual serta pemilihan diksi yang disusun untuk membangkitkan respons emosional dari pembaca.

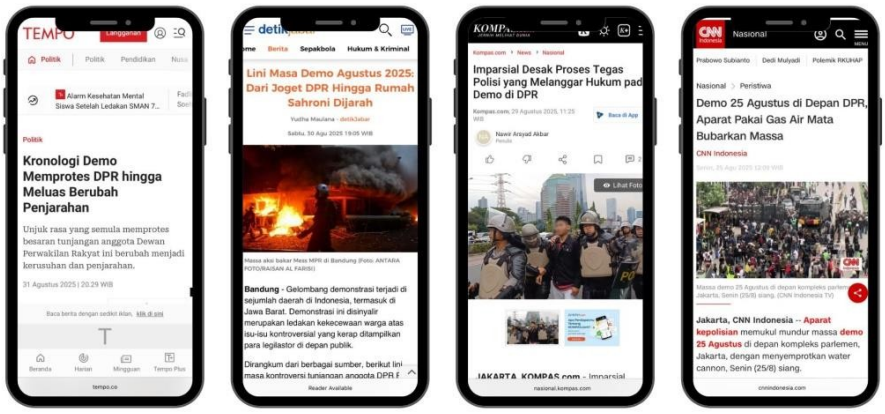

Gambar 3. Cuplikan pemberitaan dari media daring yang menampilkan narasi dan visual terkait Aksi Demokrasi 2025, 25 Agustus 2025. (Sumber: CNN Indonesia, Detik.com, Tempo.co, dan Kompas.com, diakses 25 Oktober 2025).

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil yang diperoleh oleh (Padila, 2025) yang menegaskan bahwa media digital memainkan peran penting dalam mempercepat penyebaran opini politik serta meningkatkan partisipasi publik melalui interaksi antara media arus utama dan platform media sosial. Narasi yang dikembangkan oleh media daring terbukti mampu memicu reaksi berantai di ranah digital, membangkitkan emosi publik, serta memperluas keterlibatan masyarakat dalam perdebatan politik. Konstruksi narasi mengenai Aksi Demokrasi 2025 menunjukkan bahwa media daring tidak lagi berperan secara pasif sebagai pelapor peristiwa, melainkan aktif membentuk makna dan opini publik melalui strategi wacana tertentu serta representasi ideologis yang spesifik. Isu pembubaran DPR dalam pemberitaan media daring bukan sekadar menjadi topik politik biasa, melainkan juga menjadi simbol dari pergulatan antara idealisme demokrasi rakyat dan upaya menjaga stabilitas kekuasaan.

Representasi Komunikasi Politik dan Pengaruhnya terhadap Persepsi Publik terhadap Legitimasi Politik dan Demokrasi

Representasi komunikasi politik yang tergambar dalam narasi media daring mengenai Aksi Demokrasi 2025 memperlihatkan bagaimana media berperan sebagai mediator utama antara kekuasaan politik dan masyarakat serta sebagai aktor ideologis yang ikut memengaruhi

dinamika legitimasi politik dan kualitas demokrasi di Indonesia. Melalui analisis pemberitaan yang dilakukan pada Kompas.com, Tempo.co, Detik.com, dan CNN Indonesia, ditemukan bahwa dalam ranah digital isu ini menampilkan pertarungan wacana antara narasi yang menekankan legitimasi kekuasaan institusional dan narasi yang mendukung demokrasi rakyat. Makna politik dibingkai dan ditafsirkan oleh media melalui penyampaian informasi sehingga persepsi publik terhadap lembaga negara seperti DPR terbentuk secara langsung dan tidak hanya terbatas pada narasi semata.

Menurut teori komunikasi politik yang dijelaskan McNair (2011) dalam (Irawan, 2025) media pada awalnya dijalankan sebagai saluran yang menghubungkan pemerintah serta aktor politik dengan masyarakat dan fungsi tersebut kini telah berkembang karena media daring di Indonesia tidak lagi sekadar memindahkan pesan politik tetapi juga menafsirkan serta membentuk ulang pesan tersebut dengan mempertimbangkan nilai ideologi serta kepentingan ekonomi dan politik yang memengaruhi arah redaksinya. Kondisi ini tampak jelas dalam pemberitaan mengenai Aksi Demokrasi 2025 karena sebagian media menghadirkan aksi tersebut sebagai bentuk komunikasi politik rakyat yang menunjukkan rasa kecewa terhadap kegagalan lembaga legislatif dan media lain justru membingkai peristiwa itu sebagai tanda ketidakstabilan politik serta potensi ancaman bagi tatanan demokrasi. Ragam representasi tersebut akhirnya menciptakan spektrum persepsi publik yang luas mulai dari munculnya simpati terhadap gerakan masyarakat hingga kekhawatiran mengenai kemungkinan terjadinya disintegrasi politik.

Berdasarkan penerapan analisis wacana kritis dengan menggunakan model Teun A van Dijk terlihat bahwa pada lapisan makrostruktur pemberitaan mengenai Aksi Demokrasi 2025 lebih diarahkan pada isu menurunnya legitimasi politik DPR serta merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga parlemen dan fokus semacam ini menunjukkan bagaimana media membingkai persoalan tersebut sebagai masalah besar dalam sistem politik nasional. Pada tingkat mikrostruktur pilihan kata seperti “tuntutan pembubaran DPR” serta “ketidakpuasan rakyat” dan “represifitas aparat” dimunculkan sebagai penanda adanya krisis legitimasi yang tengah berlangsung. Di sisi lain media yang memiliki kecenderungan mendukung pemerintah memakai istilah seperti “ancaman stabilitas nasional” serta “gerakan destruktif” dan “aksi inkonstitusional” untuk membentuk gambaran bahwa protes tersebut dianggap tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang dinilai sah. (Deha, 2021) menyatakan bahwa pilihan kata yang digunakan dalam pemberitaan tersebut mencerminkan framing

ideologis yang membedakan media yang pro-pemerintah dengan media yang lebih berpihak pada masyarakat sipil.

Persepsi publik terhadap legitimasi politik dan kualitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh bagaimana komunikasi politik disajikan melalui berbagai media. Hasil penelusuran konten daring dan analisis terhadap interaksi di media sosial, khususnya pada platform Instagram dan TikTok, menunjukkan bahwa pemberitaan seputar Aksi Demokrasi 2025 memperkuat kesan di kalangan publik bahwa DPR sedang menghadapi krisis kepercayaan. Penurunan legitimasi lembaga legislatif ini dipercepat oleh berbagai faktor, termasuk narasi yang menyoroti lemahnya kinerja DPR, praktik korupsi politik yang muncul, serta adanya konflik kepentingan di internal lembaga tersebut. Peran strategis media sosial terlihat jelas dari kemampuannya memperluas jangkauan pesan politik tersebut (Idris, 2025), terutama melalui efek viral yang dihasilkan oleh konten video aksi demonstrasi, unggahan kritis terhadap DPR, dan komentar masyarakat yang mempercepat penyebaran opini politik. Dalam interaksi ini terbentuk sinergi komunikasi politik dua arah, di mana masyarakat tidak hanya menerima informasi secara pasif tetapi juga aktif mereproduksi wacana politik melalui komentar, unggahan, dan diskusi daring yang mereka lakukan. Dinamika semacam ini menciptakan ruang politik digital yang lebih demokratis sekaligus menimbulkan potensi polarisasi serta penyebaran disinformasi karena algoritma media sosial cenderung memperkuat konten yang bersifat emosional dan kontroversial.

Dalam kerangka teori agenda setting dan framing power yang dikemukakan oleh Entman (1993) sebagaimana dikutip dalam Gultom (2025), isu-isu yang dianggap penting serta layak mendapat perhatian publik dibentuk melalui peran aktif media dalam menyajikan pemberitaan. Persepsi masyarakat mengenai erosi legitimasi politik DPR terbentuk secara signifikan melalui pemberitaan yang menyoroti lemahnya fungsi pengawasan lembaga legislatif serta meningkatnya praktik korupsi politik dan tindakan aparat yang represif dalam menghadapi demonstrasi. Di sisi lain, legitimasi lembaga-lembaga pemerintahan dipertahankan melalui pemberitaan yang menekankan narasi mengenai stabilitas politik serta keamanan nasional dan yang menampilkan gerakan rakyat sebagai potensi ancaman terhadap tatanan demokrasi formal. Dualitas dalam komunikasi politik media ini terlihat jelas melalui pola pemberitaan tersebut karena di satu sisi demokrasi partisipatif diperkuat sementara di sisi lain hegemoni kekuasaan tetap dipertahankan sehingga publik menerima dua kerangka pemahaman yang berbeda terkait peran lembaga politik dan masyarakat.

Kesempatan untuk membangun kesadaran politik yang lebih kritis di kalangan masyarakat terutama pada generasi muda muncul melalui keberagaman narasi yang disajikan oleh media daring. Paparan terhadap berbagai sudut pandang memungkinkan publik menilai perbedaan antara idealisme demokrasi dan kenyataan politik yang terjadi secara lebih reflektif dan mendalam. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa representasi komunikasi politik yang tercermin dalam pemberitaan mengenai Aksi Demokrasi 2025 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap persepsi publik terkait legitimasi politik dan kualitas demokrasi di Indonesia. Media daring dan platform media sosial tidak hanya mencerminkan realitas politik secara pasif tetapi juga menjalankan peran ganda dengan memproduksi makna politik baru sehingga opini publik terbentuk melalui proses tersebut. Dalam konteks reproduksi simbolik, pemberitaan seputar isu pembubaran DPR tidak hanya berfungsi sebagai laporan peristiwa semata tetapi juga menentukan cara masyarakat memahami dan melaksanakan praktik demokrasi di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran media daring sangat menentukan dalam pembentukan narasi pemberitaan mengenai Aksi Demokrasi 2025 terutama terkait isu pembubaran DPR. Analisis yang dilakukan menggunakan pendekatan wacana kritis memperlihatkan bahwa Tempo.co dan CNN Indonesia cenderung menekankan narasi tentang partisipasi publik serta krisis legitimasi politik sedangkan Kompas.com dan Detik.com lebih menyoroti aspek keamanan dan stabilitas negara. Perbedaan framing yang terlihat ini mencerminkan adanya orientasi ideologis yang memengaruhi cara penyajian serta pembingkaian peristiwa politik oleh media. Dalam konteks representasi komunikasi politik narasi yang disampaikan media daring memiliki fungsi ganda sebagai sarana penyampai informasi dan sebagai instrumen pembentuk opini publik yang berpotensi memperkuat ataupun melemahkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik serta sistem demokrasi. Peran media sosial juga tampak signifikan karena mampu memperluas jangkauan narasi tersebut sehingga terbentuk ruang politik digital yang mempercepat penyebaran opini publik dan mendorong meningkatnya partisipasi politik masyarakat.

Narasi yang dikonstruksi oleh media daring tidak sekadar memotret realitas politik, tetapi juga memainkan peran aktif dalam membentuk persepsi publik mengenai legitimasi politik serta kualitas demokrasi di Indonesia. Disarankan agar media daring menerapkan prinsip-prinsip jurnalisme yang bersifat objektif, transparan, dan berimbang ketika

memberitakan isu politik sensitif seperti Aksi Demokrasi 2025 serta tuntutan pembubaran DPR. Media juga dituntut untuk menjaga tanggung jawab etis dalam membingkai pemberitaan agar tidak menimbulkan polarisasi dan delegitimasi berlebihan terhadap lembaga negara. Selain itu, peningkatan literasi media di masyarakat menjadi hal penting agar publik dapat menafsirkan berita secara kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh framing yang bias. Temuan penelitian ini juga dapat dijadikan refleksi bagi pemerintah dan lembaga legislatif untuk memperbaiki komunikasi politik publik serta membangun kembali kepercayaan masyarakat melalui transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi. Untuk penelitian selanjutnya, studi ini dapat dikembangkan lebih mendalam dengan meneliti hubungan antara narasi media, algoritma media sosial, serta dinamika opini publik dalam konteks demokrasi digital di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al Farisi, S., Firmansyah, W. A., Zain, D. F. Q., Rijal, K., & Yakin, A. K. (2025). *Perilaku Dan Partisipasi Politik Masyarakat Sipil Sebagai Perkembangan Sosial Dalam Pembangunan Politik.* Penerbit: Kramantara JS.

Bakry, K., Milia, J., Santoso, R. Y., Asra, S., Hajuan, M. A., Maiwan, M., ... & Judijanto, L. (2024). *Sistem Politik Indonesia.* PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Deha, D. (2021). Representasi ideologi populisme dalam pemberitaan tempo co. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(2), 150-165.

Dhinanti, M., Nuranik, D. A., Azka, R., & Nazhif, M. N. (2024). Industrialisasi Media Massa Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Berita: Studi Media Online Tempo Dan Kompas. *Merdeka Indonesia Jurnal International*, 4(2), 405-420.

Gultom, Y. C. V., Safitri, N. J., Muhammad, M., & Doho, Y. D. B. (2025). Peran Media Massa dalam Membentuk Opini Publik terhadap Kebijakan Pemerintah. *LOKAKOTA Jurnal Kajian Komunikasi*, 1(01), 61-70.

Hasan, H., Bora, M. A., Afriani, D., Artiani, L. E., Puspitasari, R., Susilawati, A., ... & Hakim, A. R. (2025). *Metode penelitian kualitatif.* Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Muharrom, F., Feriyanti, O. P., & Radivan, Z. (2025). Analisis Framing Pemberitaan Indonesia Gelap Pada Media Online CNNIndonesia. Com Dan Tempo. Co (Analisis Framing R Entman*). Jurnal Komputer, Informasi dan Teknologi*, 5(1), 14-14.

Idris, U. Y. (2025). Media Sosial Dan Transformasi Komunikasi Politik. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 8(2), 49-71.

Irawan, E. P., Retnowati, Y., Adnyana, P. E. S., Anwar, R., & Candra, F. (2025). *Komunikasi Politik: Teori, Strategi, dan Implementasi.* PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia.

Iswadi, M. P. (2025). *Komunikasi Politik Digital.* PT Penerbit Qriset Indonesia.

Mukhlis, M., Al Masjid, A., Widyaningrum, H. K., Komariah, K., & Sumarlam, S. (2020). Analisis wacana kritis model Teun A. van Dijk pada surat kabar online dengan tajuk kilas balik pembelajaran jarak jauh akibat pandemi covid-19. *Geram: Gerakan Aktif Menulis,* 8(2), 73-85.

Nova, B. N. D., Khusnia, H. N., & Yohanes, Y. T. S. (2025). Kebijakan Redaksi Pemberitaan Kebencanaan Di Kabupaten Lombok Utara Pada Media Lombokpost. Jawapos. Com. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Komunikasi Universitas Mataram*, 6(1).

Padila, C. (2025). Dinamika Media Sosial dalam Mempengaruhi Opini Publik pada Era Disrupsi Digital. *Jurnal Komunikasi dan Media (JKOMED),* 1(1), 1-8.

Pamungkas, Y. C., Moefad, A. M., & Purnomo, R. (2024). Konstruksi realitas sosial di indonesia dalam peran media dan identitas budaya di era globalisasi. *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(4), 28-36.

Ramadlan, M. F. S. (2022). *Politik media, media politik: Pers, rezim, dan kemunduran demokrasi.* Universitas Brawijaya Press.

Rustandi, R., & Muchtar, K. (2020). Analisis framing kontra narasi terorisme dan radikalisme di media sosial (studi kasus pada akun@ dutadamaijabar). *Komunikatif: Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 9(2), 134-153.

Yusuf, H. (2024). Pengaruh Media Massa Terhadap Persepsi Dan Tingkat Kriminalitas: Analisis Terhadap Efek Media Dalam Pembentukan Opini Publik. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2), 1047-1061.

Wangsemukti, D. G., & Nasrullah, N. (2021). Konstruksi Media Online Terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Covid-19 DKI Jakarta. *Jurnal Spektrum Komunikasi*, 9(1), 1-12.